

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting, apalagi di sebuah bangsa yang bebas dari penjajahan, karena demokrasi atau proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak keterdidikan rakyat secara politik. Rakyat yang terdidik secara politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga ia bisa secara otonom ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam semua pengambilan keputusan, memantau proses keputusan publik dan melakukan advokasi terhadap akses kebijakan publik di lapangan.

Pendidikan politik merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana guna meningkatkan kesadaran politik rakyat sehingga ia dapat berperan sebagai pelaku dan partisipan dalam kehidupan politik kenegaraan yang sesuai dengan, nilai-nilai politik yang berlaku serta dapat menjalankan peranannya secara aktif, sadar dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai politik yang berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan akan mampu tercapainya stabilitas nasional yang semakin mantap dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Oleh karena itu pendidikan politik merupakan wahana pembinaan dan pembentukan kesadaran warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik menanamkan nilai-nilai dan ideologi yang dianut oleh suatu bangsa, dan pembentukan kesadaran itu akan dicerminkan oleh nilai-nilai, sikap dan ideologi yang dianut dan ditanamkannya.

Pemahaman terhadap konsep pendidikan politik bagi semua warga negara, terutama bagi kader dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam banyak memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan politik. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa di dalam proses

Indonesia memperoleh kemerdekaan, peranan Ormas Islam yang memiliki kesadaran politik bangsa merupakan aset strategis dalam perjuangannya melalui gerakan politis dan dakwahnya tersebut. Tiada lain, dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yaitu untuk memperoleh kemerdekaan. Pada masa pasca kemerdekaan, perubahan itu membawa pengaruh pada kesadaran politik bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) tahun 1945. Tentu saja cita-cita yang mulia itu tidak akan pernah terwujud tanpa melalui pemahaman pendidikan politik secara konsisten yang ditanamkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Iyep Hermawan (2004:4) Pemahaman pendidikan politik adalah menjadikan warga negara yang melek politik. Tegasnya adalah bahwa, warga negara yang melek politik adalah warga negara yang berkepribadian Pancasila, melek hukum dan konstitusi (1945), melek kehidupan berbangsa dan bernegara, melek masalah dan mau serta mampu berkontribusi memecahkan masalah sesuai dengan fungsi dan peran harapannya

Pendidikan Politik bertujuan untuk membentuk warga negara yang berperilaku baik dan demokratis. Diharapkan warga negara memiliki gagasan, pemikiran, ide serta pemahaman tentang pendidikan politik, sehingga dapat menjadi generasi harapan bangsa untuk tidak kehilangan karsa, cita-cita dan arah untuk menghadapi masa depan serta siap menghadapi tantangan dan rintangan berat yang menghadang.

Rusadi Kantaprawira (1999:55) memandang “Pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik”. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Menurut penegasan A. Kosasih Djahiri (1996:19) dan Abdul Azis Wahab (1996:6) agar warga negara “melek politik”, sehingga dengan berbekalkan pengetahuan dan pemahaman pendidikan politik, mereka akan memiliki kematangan dalam bersikap dan berperilaku politik.

Hal senada sebagaimana ditegaskan lagi oleh Abdul Azis Wahab (1996: 10) bahwa:

Pendidikan politik adalah salah satu bentuk Pendidikan Kewarganegaraan yang tujuannya adalah membentuk warga negara yang baik yaitu warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara. memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya (*socially sensitive, socially responsible dan socially intelligence*). selain itu sebagai warganegara Indonesia yang baik ia juga diharapkan memiliki sikap disiplin pribadi, mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, agar dicapai kualitas pribadi dan prilaku warganegara dan warga masyarakat yang baik (*socio civic behavior dan desirable personal qualities*).

Jelas bahwa Dari dua pandangan tersebut, menunjukkan urgensi pendidikan politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan warga negara Indonesia termasuk pemberian kebebasan untuk menyelenggarakannya berada pada posisi yang strategis dalam rangka membentuk kepribadian bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai dan amanat Pancasila serta Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menumbuhkan sikap peka, peduli dan responsif positif terhadap persoalan-persoalan sosial dan politik yang ada dalam kerangka pemberdayaan warga negara yang cerdas dan baik.

Dengan demikian Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan bagian dari pendidikan politik untuk membina dan meningkatkan kesadaran politik warga negara yang tidak saja berlaku pada pendidikan formal melalui persekolahan tapi lebih luas dari itu melalui jalur institusi yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks kontemporer Pendidikan Kewarganegaraan harus ditempatkan pada posisi yang profesional dalam suatu kerangka pendidikan politik terutama pada model sosialisasi politik bagi warga Negara. Dengan demikian akan terwujud suatu model pendidikan dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk (*pluralistic*). Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus melihat sebagai sarana/fasilitas untuk mendidik warga Negara yang sadar akan hak dan

tanggung jawabnya dalam kerangka sistem politik berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Sorotan lain yaitu, kedudukan dan peranan Ormas, terutama ormas Islam dalam percaturan politik sepanjang sejarah memegang peranan penting, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru maupun Orde Reformasi. Oleh karena itu apabila Pimpinan & Kader Ormas Islam itu tidak dipupuk dan diasah melalui pendidikan politik secara demokratik, dikhawatirkan akan melahirkan gerakan atau aksi sosial yang bersifat radikal dan anarkis.

Organisasi kemasyarakatan keagamaan sendiri berfungsi juga sebagai kekuatan politik dan moral, dalam konteks sejarah politik kemerdekaan Indonesia tercatat beberapa ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam (Persis), dan lain-lain menjadi bagian dari proses perjuangan perlawanan secara politis melawan penjajah dalam rangka mempertahankan keberadaan Indonesia, yang tentu saja disesuaikan dengan karakteristik pergerakan dari ormas itu sendiri. Dalam konteks Indonesia hari ini eksistensi Ormas keagamaan tersebut dalam fungsinya sebagai media partner pemerintah, memainkan peranan yang sangat signifikan dalam memandu perjalanan bangsa ini, terutama dalam merespon perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan masyarakatnya.

Sikap dan perilaku Ormas keagamaan hari ini, terutama ormas Islam tentu saja tidak hanya dilihat dari satu sisi, yang masih bergelut dalam persoalan-persoalan, tugas-tugas dan garis kebijakan internal ormasnya sendiri, tetapi di sisi lain yang harus dicermati tentang pemikirannya yang kreatif dan inovatif, suka memperjuangkan nasib manusia, memikirkan masalah-masalah tertentu yang menyangkut masyarakat luas baik itu melalui gerakan dakwahnya ataupun melalui gerakan sosialnya. Namun demikian memang patut disesalkan bahwa berbagai pengalaman peristiwa gerakan sosialnya yang dilakukan beberapa Ormas Islam terlihat kecenderungan dan berkesan menimbulkan kejadian yang tidak diharapkan secara konstitusional, seperti lahirnya gerakan Ormas Islam yang bersifat ekstrem dan radikal yang

tidak jarang menunjukkan perilaku-prilaku yang tidak seharusnya dilakukan, seperti pengrusakan, main hakim sendiri atau tindakan kriminal lainnya yang bukan hanya merugikan seseorang tetapi juga meresahkan masyarakat luas. Peristiwa semacam itu mungkin juga disebabkan pola gerakan dakwah di dalam masing-masing tubuh Ormas itu sendiri yang dalam proses menginterpretasi informasi-informasi yang bersumber dari agamanya cenderung serabutan, tidak dipahami secara benar dalam konteks implementasi tataran praktis di lapangan.

Dalam pandangan Shiddiq Amien (2005:63) Keberadaan Persatuan Islam sebagai salah satu Ormas Islam di Indonesia, sebagaimana Ormas Islam yang lainnya telah memainkan peranan penting dalam percaturan politik di Indonesia. Selain itu, perjalanan panjang sebagai sebuah organisasi dari awal berdirinya hingga keberadaannya sekarang ini, tidak terlepas dari dinamika sosio-kultural dan situasi-kondisi masyarakat, serta perilaku aktivitas politik yang di dalamnya organisasi itu tumbuh-berkembang

Sebagai organisasi yang menekankan kegiatannya pada kajian keagamaan, Persis memang bukan organisasi politik, dalam artian formalistik. Secara formal, Persis adalah organisasi sosial keagamaan. Walaupun demikian, bukan berarti Persis mengacuhkan sama sekali masalah politik. Persis pun turut serta berkecimpung dalam wacana pergerakan-kekuasaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Noer (1993:177) bahwa:

Persis juga turut berkecimpung dalam dunia politik, bisa diindikasikan dari anggota-anggotanya yang banyak berpartisipasi dalam partai politik sejak tahun 1930-an. Elite Persis pun banyak yang merangkap jabatan dengan Syarekat Islam (SI), sebuah organisasi yang berhaluan politik. Ketika terjadi pertentangan dengan SI dan dikeluarkan dari organisasi itu, elite Persis pun tidak berhenti aktif dalam politik. Mereka mendukung partai politik baru, yakni Partai Islam Indonesia (PII). Bahkan, PII cabang Bandung, dan umumnya di wilayah Jawa Barat, dikuasai elit Persis.

Dari gambaran tersebut di atas, jelas adanya keterlibatan Persis dan anggota-anggotanya dalam politik praktis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Persis tidak menutup diri dalam persoalan politik bahkan lebih jauh ikut terlibat secara aktif dalam proses pembangunan bangsa di negeri ini.

Lebih lanjut Shiddiq Amien (2005:133) menegaskan bahwa untuk memenangkan ideologi Islam dalam politik pemerintah masa itu, Persis terjun menjadi anggota istimewa Masyumi yang dipimpin oleh Mohammad Natsir yang juga aktivis Persis. K.H. Mohammad Isa Anshary dan beberapa tokoh Persis lainnya terpilih dalam unsur kepemimpinan Masyumi dan berjuang dalam percaturan politik melalui Masyumi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Persis melalui M. Natsir sebagai tokohnya menempatkan Islam tidak semata-mata suatu agama, tetapi juga suatu pandangan hidup yang meliputi soal-soal politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan

Dalam perkembangan selanjutnya, pada masa orde baru, aktivis pimpinan Persis melakukan langkah-langkah yang progres dalam aktivitas politik praktisnya. Salah satunya yang ditempuh oleh Ustadz Latief yang pada waktu itu sebagai politikus melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meskipun kesediaan dan keberadaannya menimbulkan pro dan kontra di kalangan jamaah Persis. Akan tetapi, cita-cita luhur dan idealisme perjuangannya untuk memantapkan Islam melalui peta dakwah yang lebih luas, telah memantapkan langkahnya dalam panggung politik (Shiddiq Amien, 2005:133), yang tentu saja hal tersebut dilandasi dan dilatarbelakangi oleh kondisi sosial politik yang terus berubah dan tampaknya mengarah pada era keterbukaan dan peluang bagi umat Islam untuk berpartisipasi aktif didalamnya.

Namun pada saat situasi dan kondisi politik itu berubah, baik secara radikal revolusioner maupun secara gradual, maka sikap politik seperti itu perlu dikaji ulang. Karena itu, menurut Shiddiq Amien (2005:133). Persis perlu berijtihad untuk proaktif dalam menentukan sikap politik, tanpa mengubah ormas Persis menjadi partai politik, atau tetap mempertahankan kemandirian jam'iyah tanpa mengekang kebebasan berpolitik bagi pribadi-

pribadi warganya; sebaliknya, setiap pribadi yang terjun ke dalam pentas politik dibekali dengan pendidikan politik dan misi jamiyyah itu sendiri.

Dalam dasawarsa terakhir ini, sekali lagi Politik di mata Persis tidak menjadi sesuatu hal yang perlu dihindari keberadaannya. bahkan politik menjadi sebuah sarana partisipasi dan aspirasi Persis sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara. hal ini sangat dirasakan oleh para petinggi dan anggota secara keseluruhan. meskipun dalam praktiknya, Persis sangat menjaga keterlibatannya sebagai bentuk ihtiyat / kehati-hatian dalam berpolitik praktis, sehingga diharapkan orientasi politik yang di cita-citakan oleh lembaga tersebut bisa tercapai.

Dalam pencapaian orientasi politik tersebut, muncul kemudian persoalan tentang bagaimana proses pendidikan politik yang dijalankan oleh Persis dalam upaya membangun warga negara dalam skala kecil nya anggota dan simpatisan Persis agar melek, sadar dan ikut berpartisipasi dalam politik.

Di kalangan Ormas Keagamaan (Islam), persoalan yang berkenaan dengan pembinaan pendidikan politik mencakup kebijakan respon terhadap kondisi politik dewasa ini, partisipatoris, unjuk rasa, demonstrasi, perbedaan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Sehubungan dengan itu, esensi pendidikan politik memberi tempat pada pimpinan dan kader Ormas Persis agar dapat menyelami kehidupan pemerintahan dan kenegaraan disamping sebagai sebuah lembaga kontrol dan partner pemerintahan. Yang berlandaskan kepada tuntutan memiliki rasa tanggung jawab untuk memajukan bangsa dan negara. Karenanya, perilaku politik pimpinan dan kader ormas yang ditampilkan hendaknya mencerminkan sikap positif, tidak bersikap sebaliknya yaitu merusak, menjarah, dan melanggar aturan yang merugikan masyarakat banyak. Lebih tegasnya bahwa “melek politik dan konstitusi serta permasalahan yang dihadapi” harus menjadi dasar pijakan bagi Pimpinan dan kader ormas Persis dalam mengamati kehidupan negara Indonesia. Oleh karena, tidak cukup bagi mereka hanya berbekalkan pengetahuan keilmuan

masing-masing semata, tetapi hendaknya diperkaya dengan khasanah pendidikan politik yang bermakna.

Selanjutnya, Dari gambaran di atas pembinaan pendidikan politik dirasa sangat urgen keberadaannya di lingkungan pejabat Persis dan anggotanya sebagai wahana dalam rangka perwujudan warga negara yang melek politik, berpartisipasi, sadar hukum, dll. pun juga lebih spesifik nya sebagai sarana pendewasaan dan pengintegrasian nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an dan As-sunnah yang diaplikasikan secara utuh dalam kehidupannya, baik di lingkungan lembaga itu sendiri, masyarakat, berbangsa dan bernegara. sehingga diharapkan dari adanya pendidikan politik ini, wawasan ber-politik dan melek politik setiap anggota nya benar-benar mencerminkan sikap yang elegan, taat hukum, partisipatoris dan tidak cenderung anarkis ketika mengemukakan pendapatnya.

Dengan demikian, dari gambaran umum tersebut, mengenai pendidikan politik dan ormas keagamaan menarik untuk dikaji salah satunya pada Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Bandung. Dipilihnya Pimpinan Pusat Persis sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan :

1. Pada lingkungan Pimpinan Pusat Persis, sepanjang sejarahnya telah tumbuh menjadi organisasi kemasyarakatan yang tidak hanya fokus statis pada persoalan yang menyangkut ibadah dalam arti sempit saja, tetapi organisasi ini juga mempunyai sifat dinamis yang mempunyai respons terhadap persoalan politik, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa Ormas Persis sudah aktif dalam dunia politik praktis dahulu dan dewasa ini, yang semua itu berimplikasi pada kecenderungan pendidikan politik di lingkungannya. Sehingga bagaimanakah pendidikan politik ini diterapkan
3. Sebagai sikap kepedulian penulis ingin mengamati lebih dekat tentang persoalan pemahaman dan pembinaan pendidikan politik Persis baik secara ideologis maupun filosofis dalam membangun warga negara melek politik.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini diberikan penekanan pada “pendidikan politik”, hal ini didasarkan pada amanat dan salah satu tujuan PKn “ perlunya ditingkatkan pembinaan pendidikan politik dalam kerangka pembentukan warga negara melek politik”.

Di lingkungan Persatuan Islam (Persis) persoalan yang berkenaan dengan pendidikan politik mencakup melek politik, sadar hukum/ konstitusi, partisipasi politik, perilaku politik, materi pendidikan politik yang didalamnya termasuk juga bagaimana mengemukakan pendapat di muka umum, menghargai pendapat orang lain dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, serta bagaimana Persis sebagai sebuah Ormas mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun dan membentuk warga negara yang cerdas dalam politik tidak hanya untuk masyarakat di dalam Persis secara interen saja, tetapi secara makro untuk negara-bangsa secara nasional, sekaligus mampu menjawab tantangan dan rintangan yang berkenaan dengan politik dewasa ini.

Dengan demikian, maka masalah pokok yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana peran Pimpinan Pusat Persatuan Islam dalam melakukan pendidikan politik bagi warga negara. Kajian tentang “Peran Ormas dan pendidikan politik” ini diharapkan dapat memberikan pengayaan khasanah ilmu sosial dalam mempelajari salah satu gejala sosial, yakni mengenai pendidikan politik pimpinan dan kader dalam organisasi kemasyarakatan melalui pendekatan sosial khususnya pada tingkat mikro.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan filosofis dan ideologis Persatuan Islam (Persis) dalam pendidikan politik warga negara?
2. Bagaimana materi, media dan metode kegiatan pendidikan politik Persis?
3. Apa yang menjadi hambatan Persis dalam melakukan pendidikan politik ?

4. Bagaimana strategi Persis dalam menghadapi hambatan pendidikan politik warga negara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pendidikan politik di lingkungan Persatuan Islam Bandung dalam upaya membangun warga negara melek politik..

Secara spesifik, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Memperoleh gambaran tentang landasan filosofis dan ideologis Persis dalam melakukan pendidikan politik. Tujuan ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh peran Ormas Persatuan Islam dalam melakukan pendidikan politik.
2. Memperoleh gambaran tentang materi, media dan metode kegiatan Persis dalam pendidikan politik warga negara.
3. Memperoleh gambaran tentang apa saja yang menjadi hambatan Persis dalam melakukan pembinaan pendidikan politik.
4. Mengetahui gambaran Bagaimana strategi Persis dalam menghadapi hambatan pembinaan pendidikan politik warga negara.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat, baik untuk keperluan pengembangan keilmuan maupun untuk kepentingan praktis dalam kehidupan masyarakat. Kajian ini berfokus pada pokok masalah tentang proses pendidikan politik Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Islam. yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Meskipun ada beberapa penelitian terdahulu menyoroti tentang pendidikan politik, namun relevansinya berbeda, karena kajian “pendidikan politik” dalam penelitian ini berhubungan dengan keberadaan Ormas Persatuan Islam”, berarti secara konseptual diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk pengembangan keilmuan. Selain itu juga diharapkan dapat mendukung terhadap

terciptanya dan suksesnya pembangunan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-undang, khususnya yang menyangkut “ peningkatan pendidikan politik bagi warga negara”.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi :

- a. Institusi, sebagai masukan bagi Lembaga Ormas persatuan Islam yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap pimpinan dan kader nya melalui pendidikan politik, sehingga diharapkan melahirkan pimpinan dan kader yang mencerminkan sikap dan perilaku politik bukan saja berwawasan teoritis, tetapi juga memiliki pengetahuan di bidang politik, hukum dan konstitusi, sehingga dalam tataran praktis bisa direalisasikan secara maksimal.
- b. Para akademis atau komunitas akademik, khususnya dalam bidang pendidikan kewarganegaraan sebagai bahan kontribusi dan informasi tentang bagaimana Pendidikan Politik dalam sebuah Organisasi kemasyarakatan.
- c. Peneliti sendiri, melalui penelaahan secara konseptual dari berbagai literatur dan pengalaman di lapangan, serta arahan dari pembimbing dan masukan dari nara sumber lain, menempa penulis menjadi lebih kritis dan responsif. Dan pada akhirnya akan menambah dan memperluas wawasan dan cakrawala berpikir serta kemampuan dalam memecahkan masalah dan tantangan yang dihadapi